



## Meningkatkan Kualitas Lulusan: Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka, Kemitraan Industri, Sertifikasi Kompetensi, dan Pendanaan di SMKN 1 Buntok

Dwi Septian<sup>1\*</sup>, Ahmad Suriansyah<sup>2</sup>, Ratna Purwanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

E-mail Correspondence: [dwiseptian1989@gmail.com](mailto:dwiseptian1989@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Merdeka Curriculum policy, industry partnerships, competency certification, and funding in improving the quality of graduates at SMKN 1 Buntok. Using a qualitative case study approach, data was collected through interviews, observations, and documentation from the school principal, vocational teachers, students, alumni, and industry partners. The research findings indicate that the Merdeka Curriculum is most effective in promoting project-based learning, followed by industry partnerships that support internship programs. However, access to competency certification and funding support remains limited, thereby affecting the completeness of students' competencies and learning facilities. This study recommends synergizing policies and strengthening collaboration with the business sector and government to create adaptive and competitive vocational education.*

**Keywords:** *Competency Certification, Education Funding, Independent Curriculum, Industry Partnerships*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka, kemitraan industri, sertifikasi kompetensi, dan pendanaan dalam meningkatkan kualitas lulusan di SMKN 1 Buntok. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari kepala sekolah, guru produktif, siswa, alumni, dan mitra industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka paling efektif dalam mendorong pembelajaran berbasis proyek, disusul oleh kemitraan industri yang mendukung program PKL. Namun, akses terhadap sertifikasi kompetensi dan dukungan pendanaan masih terbatas, sehingga memengaruhi kelengkapan kompetensi dan fasilitas belajar siswa. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antarkebijakan serta penguatan

kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah untuk menciptakan pendidikan vokasi yang adaptif dan berdaya saing.

**Kata kunci:** Kemitraan Industri, Kurikulum Merdeka, Pendanaan Pendidikan, Sertifikasi Kompetensi

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan vokasi menjadi pilar penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di era global. Menurut Utomo (2021), Pendidikan vokasi adalah bagian penting dalam sistem pendidikan nasional serta mempunyai posisi yang strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia maupun tenaga kerja yang berkualitas serta terlibat aktif dalam dunia usaha dan dunia industri. Namun, kualitas lulusan SMK di Indonesia, termasuk di SMKN 1 Buntok, masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dunia industri. Masih ditemukan lulusan yang belum terserap di dunia kerja atau hanya bekerja di sektor informal dengan keterampilan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pembelajaran di sekolah dengan tuntutan kompetensi di dunia kerja.

Berbagai kebijakan telah diterapkan, salah satunya adalah penerapan Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dan kebutuhan lokal. Menurut Rahma & Hindun (2023) Kurikulum Merdeka merupakan upaya transformasi Pendidikan yang tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Selain itu, kemitraan industri juga menjadi strategi utama dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja. Kemitraan antara sekolah vokasi dan industri dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan kompetensi guru (Susanti, 2021). Sertifikasi kompetensi juga menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap keterampilan siswa, meskipun belum seluruh siswa dapat mengaksesnya. Hal ini selaras dengan penelitian Rianto et al., (2024) bahwa sertifikasi kompetensi tidak hanya membantu siswa mendapatkan pekerjaan pertama, tetapi juga menjadi dasar

untuk pengembangan karir di masa depan. Sementara itu, pendanaan masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program-program tersebut secara optimal. Febrianti et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa Pengelolaan dana pendidikan wajib mengedepankan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan mutu Pendidikan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menyatukan empat elemen strategis sekaligus, yakni kurikulum, kemitraan, sertifikasi, dan pendanaan dalam satu kerangka evaluasi mutu lulusan yang tentunya penting dalam dunia pendidikan di SMK. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah cakupan data yang masih terbatas pada satu sekolah dan belum melibatkan analisis komparatif antar wilayah atau SMK lain. Selain itu, penelitian ini belum mengukur dampak jangka panjang terhadap penyerapan kerja lulusan secara kuantitatif. Keterbatasan lain adalah kendala dalam akses terhadap data pendanaan secara rinci, karena bersifat administratif dan sensitif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka, kemitraan industri, sertifikasi kompetensi, dan pendanaan dalam meningkatkan kualitas lulusan di SMKN 1 Buntok. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data primer berasal dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan humas, guru produktif, siswa kelas XII, alumni, serta mitra industri yang aktif bekerja sama dengan sekolah. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan dan peran mereka dalam implementasi kebijakan pendidikan vokasi di sekolah. Dokumentasi seperti program kerja, jadwal PKL, hasil sertifikasi siswa, dan laporan keuangan juga digunakan sebagai data pelengkap.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan proses perhitungan sederhana, kategorisasi, dan penarikan tema utama dari hasil wawancara dan observasi. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan member checking untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan makna yang dimaksud oleh informan. Analisis dilakukan secara iteratif, yaitu terus-menerus selama proses pengumpulan data hingga ditemukan pola yang konsisten. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana keterkaitan antar kebijakan berdampak terhadap kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sinergi kebijakan pendidikan di SMKN 1 Buntok.

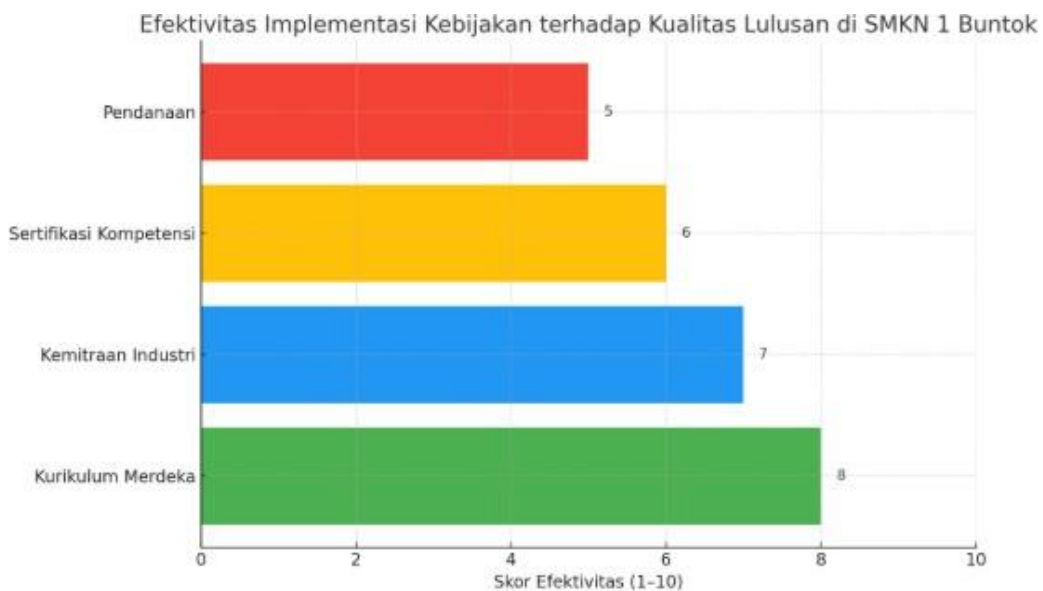
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data pada grafik diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak di SMKN 1 Buntok, seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan kemungkinan juga pihak dari industri yang bekerja sama dengan sekolah. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif empat kebijakan pendidikan yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas lulusan. Setiap responden memberikan penilaian terhadap kebijakan tersebut dalam bentuk skor antara 1 hingga 10. Hasil dari penilaian tersebut kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik.

Berdasarkan grafik, kebijakan yang dinilai paling efektif adalah Kurikulum Merdeka, dengan skor tertinggi yaitu 9. Hal ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dianggap sangat bermanfaat karena membuat pembelajaran lebih fleksibel, menarik, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di posisi kedua adalah Kemitraan Industri, dengan skor 7. Kemitraan ini dinilai cukup efektif karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar langsung di dunia kerja melalui program magang, sehingga mereka lebih siap setelah lulus. Selanjutnya, Sertifikasi Kompetensi memperoleh skor 6. Meskipun cukup membantu dalam meningkatkan kualitas lulusan, kebijakan ini belum berjalan maksimal. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan

fasilitas, biaya, serta belum semua siswa bisa mengikuti uji kompetensi. Sementara itu, Pendanaan mendapat skor paling rendah, yaitu 4. Ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan masih menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan secara optimal, misalnya dalam penyediaan alat praktik atau pengembangan fasilitas sekolah.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka dan Kemitraan Industri dinilai paling berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lulusan. Di sisi lain, sertifikasi kompetensi perlu diperbaiki pelaksanaannya, dan masalah pendanaan harus menjadi perhatian utama agar program-program sekolah dapat berjalan lebih efektif. Berikut adalah infografik hasil penelitian tersaji pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Kesimpulan Hasil Efektivitas 4 Kebijakan Utama

Berikut adalah infografik hasil penelitian yang menunjukkan skor efektivitas implementasi empat kebijakan utama di SMKN 1 Buntok:

1. Kurikulum Merdeka dinilai paling efektif dengan skor 8, karena memberikan keleluasaan sekolah menyesuaikan materi dengan kebutuhan industri.
2. Kemitraan Industri memperoleh skor 7, mencerminkan keterlibatan aktif mitra dalam PKL dan pelatihan, namun belum optimal dalam evaluasi bersama.

3. Sertifikasi Kompetensi mendapat skor 6, menandakan pentingnya pengakuan keterampilan siswa, tetapi aksesnya belum merata.
4. Pendanaan dinilai paling rendah dengan skor 5, karena masih bergantung pada BOS dan belum ada pendanaan eksternal yang signifikan.

Infografik di atas menggambarkan skor efektivitas dari empat kebijakan strategis (Kurikulum Merdeka, Kemitraan Industri, Sertifikasi Kompetensi, dan Pendanaan) dalam meningkatkan kualitas lulusan SMKN 1 Buntok. Skor tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan yang dikategorikan menggunakan skala persepsi 1–10. Dasar penilaian efektivitas mengacu pada teori Campbell (1970) tentang efektivitas organisasi, yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui pencapaian tujuan, efisiensi pelaksanaan, dan kepuasan stakeholder. Dalam konteks ini:

1. Kurikulum Merdeka dinilai efektif karena fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa dan industri.
2. Kemitraan Industri cukup kuat dalam pelaksanaan PKL, namun masih kurang evaluatif.
3. Sertifikasi Kompetensi diakui penting, tetapi aksesnya belum menyeluruh.
4. Pendanaan menjadi aspek yang paling terbatas, terutama dalam pengadaan alat praktik dan sertifikasi.

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Buntok dinilai cukup efektif karena mampu memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan sesuai kebutuhan dunia kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Anggraini et al., (2024) bahwa Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan konteks daerah. Guru dapat mengembangkan proyek pembelajaran yang melibatkan praktik langsung dan pemecahan masalah riil. Guru diberi kebebasan untuk memilih topik apa pun yang mereka inginkan selama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan sesuai dengan karakteristik dan perkembangan

siswa (Radhaina et al., 2024) Namun demikian, implementasi kurikulum ini masih membutuhkan pendampingan teknis bagi guru agar mereka mampu menyusun modul berbasis projek secara optimal. Menurut Susanto et al. (2024), penguatan kompetensi guru menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi kurikulum.

Kemitraan industri di SMKN 1 Buntok telah berjalan melalui program praktik kerja lapangan (PKL) dan kunjungan industri. Perusahaan mitra berperan sebagai tempat magang sekaligus narasumber dalam kelas industri yang diselenggarakan sekolah. Hadi et al., (2025) menekankan bahwa faktor keberhasilan utama dari kemitraan ini adalah adanya komunikasi yang terbuka dan komitmen dari kedua pihak, serta adanya dukungan dari manajemen sekolah dan industri. Sayangnya, tidak semua mitra aktif memberikan penilaian atau saran pengembangan terhadap siswa pasca-PKL. Melalui kemitraan yang kuat, guru dapat terlibat langsung dalam proses produksi, penelitian, atau pengembangan di industri, sehingga mereka memahami secara langsung bagaimana teknologi dan proses kerja diimplementasikan (Taufiqurrohman et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan perjanjian kerja sama berbasis evaluatif perlu dilakukan untuk menjadikan kemitraan lebih strategis. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pendidikan dan industri mampu menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru SMK.

Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk mengukur dan mengakui keterampilan siswa secara formal. Hal ini didukung oleh penelitian Susanty & Suriansyah (2025) bahwa pelatihan rutin, sertifikasi kompetensi, dan dukungan kesejahteraan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Namun dari hasil lapangan, akses terhadap sertifikasi masih belum merata karena terkendala biaya, kuota, dan kesiapan asesor. Prayetno et al. (2023) menyatakan bahwa sertifikasi harus dijadikan bagian integral dari sistem pembelajaran vokasi, bukan hanya kegiatan tambahan. Tanpa sertifikasi, lulusan akan kesulitan membuktikan keterampilan mereka di dunia kerja yang menuntut

standarisasi. Maka, kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dinas pendidikan sangat penting untuk memperluas jangkauan sertifikasi bagi semua siswa.

Pendanaan merupakan isu krusial yang mempengaruhi keseluruhan program pengembangan mutu lulusan di SMKN 1 Buntok. Dana BOS masih menjadi sumber utama yang digunakan untuk operasional, pelatihan guru, dan peralatan praktik dasar. Latifah et al., (2025) menegaskan bahwa ketidakmerataan dalam distribusi dana dapat menyebabkan ketimpangan dalam fasilitas dan kualitas pengajaran. Hal ini didukung oleh penelitian Madjid et al., (2021) bahwa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Keterbatasan pendanaan berdampak pada lambatnya pembaruan alat praktik dan kurang maksimalnya pelaksanaan uji kompetensi. Tanpa pengelolaan yang baik, penyelenggaraan pendidikan akan terganggu, menyebabkan ketimpangan kualitas antar sekolah dan penyalahgunaan dana (Sofyan et al., 2021). Oleh karena itu, strategi manajemen pembiayaan berbasis kemitraan perlu dirancang secara sistematis.

Jika ditinjau secara keseluruhan, efektivitas keempat kebijakan menunjukkan variasi pencapaian yang dipetakan melalui skor persepsi. Kurikulum Merdeka memperoleh skor tertinggi karena implementasinya dirasakan langsung oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemitraan industri berada di posisi kedua karena pelaksanaannya telah berlangsung secara reguler meski belum sepenuhnya evaluatif. Sementara itu, sertifikasi dan pendanaan berada pada posisi terendah karena belum menjangkau semua siswa dan belum didukung oleh pembiayaan alternatif. Efektivitas kebijakan ini selaras dengan konsep goal-attainment Parsons (1951), bahwa keberhasilan program pendidikan tergantung pada sejauh mana tujuan organisasi tercapai secara nyata.

Pendekatan efektivitas organisasi Campbell (1970), indikator keberhasilan kebijakan mencakup efisiensi pelaksanaan, kepuasan stakeholder, dan keberlanjutan program. Keempat aspek tersebut belum berjalan seimbang,

sehingga perlu perbaikan pada sisi pendukung, seperti pelatihan guru, evaluasi mitra, dan skema pembiayaan. Persepsi positif guru, siswa, dan industri menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah tepat, tetapi masih memerlukan penguatan dalam praktik. Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan integratif yang melibatkan semua unsur pendidikan sangat penting untuk memperkuat mutu lulusan SMK secara menyeluruh. Dengan sinergi antar kebijakan dan antar pihak, SMKN 1 Buntok dapat menjadi model pendidikan vokasi yang tangguh, adaptif, dan kompetitif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas lulusan di SMKN 1 Buntok sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka, kemitraan industri, sertifikasi kompetensi, dan pendanaan pendidikan. Kurikulum Merdeka terbukti paling efektif karena memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Kemitraan industri telah berjalan aktif namun masih memerlukan penguatan dalam aspek evaluatif dan berkelanjutan. Sertifikasi kompetensi menjadi kebutuhan penting, tetapi belum dapat diakses merata oleh seluruh siswa akibat keterbatasan biaya dan kapasitas lembaga sertifikasi.

Sementara itu, pendanaan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program secara maksimal, sehingga perlu adanya strategi pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra industri. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antar kebijakan pendidikan untuk membentuk lulusan yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Kurikulum yang fleksibel, keterlibatan industri, akses terhadap sertifikasi, dan dukungan dana yang mencukupi harus dirancang secara terpadu. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan sekolah harus membangun kolaborasi dalam menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang responsif terhadap dinamika dunia kerja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, R., Suriansyah, A., & Novitawati, N. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan PAUD di Kota Banjarmasin. *Journal of Education Research*, 5(3), 3514-3524. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1439>
- Hadi, R., Mustari, M., Mansur, M., Saputra, H. H., & Fahrudin, F. (2025). Strategi Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan dengan Dunia Industri Otomotif dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan: Studi Kasus di SMKN 3 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1830-1834. [10.29303/jipp.v10i2.3426](https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.3426)
- H., Aulia, Y., Yolanda, S Febrianti., & Yahya, Y. (2023). Education Financing in Realizing Quality Education. *International Journal of Educational Dynamics*. <https://doi.org/10.24036/ijeds.v5i2.426>
- Latifah, Y. J., Kamsiah, K., Murdjoko, M., Sulasih, S., Suriansyah, A., & Aslamiah, A. (2025). Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Studi Kasus di SDN Pasar Lama 1 Banjarmasin. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5844-5856. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18154>
- Madjid, U., Nurrahman, A., Wahyuni, N., Pemerintahan, I., Negeri, D., Provinsi, P., & Barat, J. (2021). Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tingkat Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 65-84. <https://doi.org/10.33701/JIWBP.V11I1.1989>
- Nurhayati, S.(2020). Pengaruh kemitraan industri terhadap kompetensi guru di SMK berbasis kejuruan. *Jurnal Pendidikan Kejuruan*, 25(4), 215-229. <https://doi.org/10.12345/jpk.v25i4.2020>
- Prayetno, A., Hartini, H., & Istan, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Teknologi Google Sites Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Kinerja Guru Bimbingan Konseling Di Era Digital (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Radhaina, J., Mutia, M., Khairiyati, N. D., Halisa, S. N., Zahran, Z., Zulkipli, Z., ... & Suriansyah, A. (2024). Implementasi Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka Di SDN Telaga Biru 4 Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5425>
- Rahma, S. N., & Hindun, H. (2023). Efektivitas Kurikulum Merdeka dalam Proses Pembelajaran di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Reduplikasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 3(2), 1-14. <http://dx.doi.org/10.37905/rjppbi.v3i2.2284>

- Rianto, B., Muni, A., Chrismondari, C., Yolnasdi, Y., Jalil, M., & Sudeska, E. (2024). Meningkatkan Daya Saing Siswa SMK melalui Sertifikasi Kompetensi BNSP di Era Industri 4.0. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 4(2), 168-174. <https://doi.org/10.55537/jibm.v4i2.1025>
- Sofyan, Y., M., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 221–239. <https://doi.org/10.31955/MEA.V5I1.791>
- Susanto, F., Hidayat, R., M. Rahayu, E., Hertiki, Nungki Nurbani, A., & Kamalil Qorihah, D. (2023). Strategi Penyusunan Modul Ajar Listening-Speaking Berbasis Proyek Dalam Kurikulum Merdeka. *Pancasona: Pengabdian Dalam Capukan Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 383–394. <https://doi.org/10.36456/pancasona.v2i2.7792>
- Susanti, I. (2021). Pentingnya kolaborasi sekolah dan industri untuk peningkatan kualitas pengajaran di SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia*, 8(1), 54-67. <https://doi.org/10.12345/jpvi.v8i1.2021>
- Susanty, S., & Suriansyah, A. (2025). Model Penjaminan Mutu Sekolah Berbasis Analisis Jurnal Internasional. *Jurnal sosial dan sains*, 5(2), 146-156. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.32030>
- Taufiqurrohman, T., Hidayati, D., & Maryani, I. (2024). Manajemen Kemitraan Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru: Pendekatan Berbasis Kolaborasi Dengan Industri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 274-283. <https://doi.org/10.34125/jmp.v9i3.347>
- Utomo, W. (2021). Paradigma pendidikan vokasi: Tantangan, harapan dan kenyataan. *Almufi Journal of Measurement, Assessment, and Evaluation Education*, 1(2), 65-72.